

Daftar Pustaka

Perundang-Undangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 *Tentang Pengupahan*
- Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 *Tentang Dewan Pengupahan*
- Indonesia. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 *Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak*.
- Indonesia. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 07 Tahun 1990 *Tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah*
- Indonesia. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 *Tentang Upah Minimum*
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Perundang-Undangan*.
- Indonesia. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2005 *Tentang tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional*
- Indonesia. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 201 Tahun 2001 *Tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial*

Buku

- Departemen Hukum Dan HAM R.I. *Evaluasi Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Mendasar Di Tempat Kerja Bagi Pekerja Perkebunan*. Jakarta : Tanpa Penerbit, 2006.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, cet-6. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, cet. 13. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Masriani, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. .Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soepomo, Imam. *Pengantar Hukum Perburuhan*, cet. 13. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Uwiyiono, Aloysius, *et al.*, *Aas-Asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Jurnal

Budoyo, Sapto. *Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Volume IV, No 02, Juli 2014.

Internet

<http://jabar.tribunnews.com/2015/11/25/menteri-ketenagakerjaan-tegaskan-pp-no-78-tentang-pengupahan-tidak-akan-direvisi/> . Diakses pada tanggal 17 Februari 2016

<http://www.ehijrah.com/2774/ini-alasan-buruh-menolak-pp-no-78-tahun-2015-tentang-pengupahan/> Diakses pada tanggal 17 Februari 2016

<http://bisnis.liputan6.com/read/2355295/ini-rincian-pp-pengupahan-yang-ditolak-buruh>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2016

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151026204625-20-87521/menaker-dewan-pengupahan-tetap-berperan-meski-pp-78-terbit/>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2016

<http://bisnis.liputan6.com/read/2374519/menaker-pp-pengupahan-justro-menguntungkan-buruh>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2016

<http://turc.or.id/news/lapsus-upah-minimum-ditetapkan-pengusaha-melawan-buruh-menghadang/>. Diakses pada tanggal, 01 Maret 2016

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/538/jbptunikompp-gdl-iraquraisy-26896-4-unikom_i-i.pdf. diakses pada tanggal, 17 Februari 2016